

Analisis kebutuhan daerah untuk pembentukan bumd pariwisata

Aulia Hapsari Juwita^{1*}, Dwi Prasetyani², Vita Kartika Sari³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Email: aulahjuwita@staff.uns.ac.id

Abstrak

Letak geografis Kabupaten Magetan sebagian kawasannya berada di dataran tinggi membuat daerah ini diuntungkan dengan sumber daya alam yang melimpah. Pariwisata dengan panorama alam menjadikan kawasan tidak sepi dari pengunjung. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten masih merasa kurang dalam pengelolaannya. Hal demikian terbukti di dalam penerimaan hasil Perusahaan Milih Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan relatif lebih rendah dibandingkan pos pendapatan lainnya. Selain itu permintaan publik terhadap pengelolaan yang lebih baik juga meningkat, sehingga Pemerintahan menginginkan pembentukan BUMD Pariwisata untuk meningkatkan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan daerah untuk menilai kelayakan pembentukan BUMD Pariwisata di Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif diskriptif. Tahapan yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari analisis kebutuhan daerah untuk mendirikan BUMD Pariwisata adalah perlu meningkatkan pelayanan umum dan pengelolaan daerah. Kelayakan Bidang usaha seperti aspek ekonomi, pasar dan pemasaran, yuridis, dan kekayaan daerah juga perlu ditinjau lebih dalam. Dengan begitu pembentukan BUMD layak di jalankan.

Kata Kunci: Kebutuhan daerah; pembentukan BUMD; pariwisata

Analysis of regional needs for the formation of tourism enterprises

Abstract

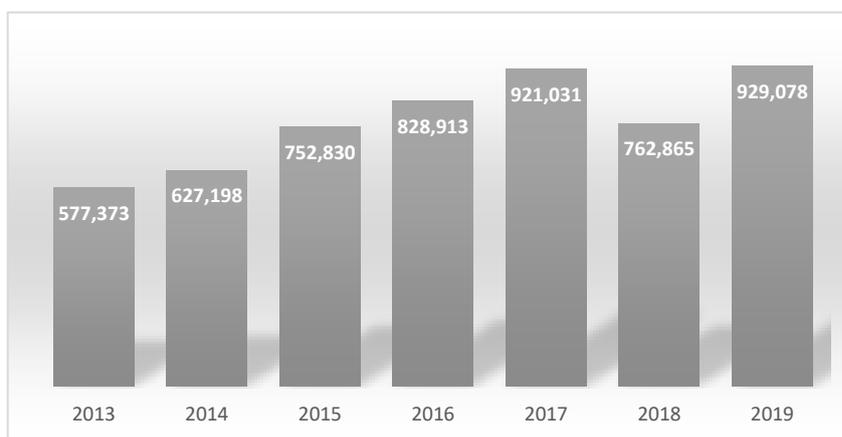
The geographical location of Magetan Regency, part of which is in the highlands, makes this area benefit from its abundant natural resources. Tourism with a natural panorama makes the area not empty of visitors. Even so, the District Government still feels lacking in its management. This is evident in the revenue receipts of Regional Selected Companies and Regional Wealth Management which are separated are relatively lower than other income posts. In addition, public demand for better management has also increased, so the Government wants the establishment of a Tourism BUMD to improve its management. This study aims to analyze regional needs to assess the feasibility of establishing a Tourism BUMD in Magetan Regency. This research is a descriptive qualitative research method. The steps taken are through observation, interviews, and documentation. The results obtained from the analysis of regional needs are that if Magetan Regency wants to establish a Tourism BUMD, it is necessary to improve public services and regional management. Feasibility Business fields such as economic, market and marketing aspects, juridical, and regional wealth also need to be reviewed more deeply. Thus, the establishment of BUMD is feasible to run.

Keywords: *Regional needs; BUMD establishment; tourism*

PENDAHULUAN

Potensi dan perkembangan pembangunan pariwisata daerah sejak lama memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat di daerah khususnya dan negara pada umumnya, utamanya dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Perkembangan pariwisata daerah mendorong tumbuhnya sektor kegiatan usaha dengan fungsi-fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, seperti obyek wisata sebagai destinasi wisata, seni dan budaya serta teknologi menjadi atraksi wisata, kuliner dan tempat tinggal seperti hotel, wisma, guest house, bungalow sebagai akomodasi wisata, transportasi dan tempat parkir sebagai penunjang akses wisata, industri kreatif cinderamata melengkapi pariwisata dengan produk khas setempat dengan daya tarik istimewa. Hal ini tidak lepas karena adanya permintaan para pengunjung terkait sarana prasarana atau fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan pengunjung terus meningkat. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan hiburan ditengah kesibukan bekerja juga menjadi faktor meningkatnya permintaan wisata (Sumiasih, 2018). Permintaan keputusan konsumen terhadap permintaan pariwisata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi, faktor geografi, sikap sosial budaya untuk pariwisata, mobilitas, peraturan pemerintah, media komunikasi dan teknologi dan teknologi informasi, Middleton (2001).

Pariwisata di Kabupaten Magetan tidak pernah sepi pengunjung meskipun berdasarkan data BPS jumlah pengunjung mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2013-2019.



Gambar 1. Jumlah pengunjung wisata kabupaten magetan

Jumlah pengunjung di tahun 2019 mencapai 929.078 pengunjung. Jumlah pengunjung yang banyak ini tentunya memiliki pengaruh terhadap pasar yang ada di kawasan wisata Kabupaten Magetan apalagi daerah ini mempunyai ikon wisata alam yang terkenal yaitu Telaga Sarangan. Destinasi wisata dengan kekuatan keunggulan nuansa pemandangan alam pegunungan yang indah, udara yang sejuk, dan ketersediaan sarana akomodasi yang memadai. Tempat ini mampu dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri maupun manca negara. Potensi pariwisata serta dukungan sarana prasarana jalan akses menuju objek-objek wisata sudah semakin baik tetapi belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Daerah secara optimal. Dampak ini dapat dilihat pada pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di pendapatan asli daerah. Mengingat jumlah pengunjung yang fluktuatif dari tahun ke tahun dapat diidentifikasi bahwa potensi pariwisata yang melimpah itu belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat berdaya guna maupun berhasil guna secara maksimal.

Tabel 1. Pos pendapatan asli daerah kabupaten magetan tahun 2016-2019

POS PAD	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	36.779.143.270	42.257.831.750	47.290.835.290	56.927.247.910
Retribusi Daerah	18.487.561.110	42.257.831.750	25.384.452.540	29.937.450.800
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.272.143.760	19.114.487.390	2.568.034.180	4.450.413.560
Lain-lain PAD yang sah	108.076.143.760	96.261.660.660	121.776.817.430	146.044.831.510

Berdasarkan tabel 1. Pos PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada tabel tersebut hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mendapatkan jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan pos PAD yang lain. Sedangkan pos ini merupakan jenis pos dengan pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan PAD sebagai salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*), (Munthe, 2019)

Perkembangan teknologi membuat masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam pariwisata. Publik menuntut tanggungjawab pemerintah daerah untuk pembaruan dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi warga masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun standar pelayanan publik. Dalam pelayanan publik harus dibuat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang jelas, sehingga pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata Daerah agar optimalisasi pendayagunaan potensi pariwisata Daerah itu lebih dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Potensi pariwisata juga memberikan manfaat ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan yang berujung pada perekonomian masyarakat yang semakin kuat sehingga kemandirian dan ketahanan ekonomi tercipta (Setiawan dkk, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kebutuhan daerah Kabupaten Magetan dalam kelayakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pariwisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari *grounded theory* dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi, (Gunawan, 2013). Kirk dan Miller dalam Agunggunanto (2016) menekankan jika penelitian kualitatif adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata (Agunggunanto, 2016). Tahapan penelitian yang dilakukan adalah pertama dengan observasi. Observasi ditujukan untuk mendapatkan gambaran lingkungan yang ada dikawasan pariwisata. Tahap kedua, wawancara. Wawancara dilakukan pada pemangku kebijakan, stakeholder dan masyarakat atau pengunjung wisata. Tahap ketiga, dokumentasi. Dokumentasi untuk memperoleh bukti fisik agar dapat dilakukan pemetaan. Setelah ketiga tahap itu telah dilalui maka penulis melakukan identifikasi kondisi internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap BUMD Pariwisata Kabupaten Magetan.

Secara skematik pembentukan BUMD Pariwisata menurut PP No 54 tentang Badan Usaha Milik Daerah dapat dilihat dari kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD. Analisis kebutuhan daerah ini terpecah menjadi dua yaitu pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Tujuan pelayanan pada dasarnya adalah untuk memuarkan masyarakat. Kebutuhan masyarakat berdasarkan UU No 10 tahun 2009

tentang Kepariwisataan, menegaskan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Destinasi pariwisata Kabupaten Magetan terdiri dari telaga sarangan, air terjun ngadiloyo, telaga wahyu, puncak lawu, candi cimbatan wetan, mojosemi forest park dan taman geni langit. Di tahun 2019 pengunjung tertinggi ada di destinasi Telaga Sarangan sebesar 917.308 pengunjung

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Kabupaten Magetan Tahun 2019

Bulan	Telaga Sarangan	Air Terjun Ngadiloyo (Tirtosari)	Telaga Wahyu	Puncak Lawu/ Cemoro Sewu	Candi Simbatan Wetan / Petirtaan Dewi Sri	Mojosemi Forest Park	Bumi Perkemahan Sarangan / Camping Ground	Taman Genilangit
Jan.	140.463	2.570	2.063	1.362	816	4.016	630	10.398
Feb.	43.665	1.574	698	1.469	807	4.400	524	6.091
Maret	36.580	1.744	573	2.075	800	4.310	596	5.459
April	63.321	2.194	1.211	2.583	801	3.994	603	6.167
Mei	24.051	1.137	207	1.364	804	3.821	499	2.477
Juni	171.293	7.748	1.855	7.739	812	4.102	1.869	17.974
Juli	106.613	4.125	987	4.325	860	6.405	618	11.727
Agust.	49.700	2.526	305	4.885	830	3.810	571	7.363
Sept.	56.248	1.986	552	3.532	800	4.721	540	9.402
Okt.	52.727	1.990	455	2.633	1.020	4.256	515	8.967
Nov.	64.871	2.224	1.305	1.949	799	2.954	524	10.433
Des.	107.776	2.693	1.661	2.700	850	6.714	682	19.083
Total	917.308	32.511	11.872	36.616	9.999	53.503	8.171	115.541

Pengunjung tertinggi berikutnya adalah taman geni langit sebesar 115.541 pengunjung. Untuk Bumi Perkemahan Sarangan/ Camping Ground memiliki jumlah pengunjung paling sedikit yaitu 8.171 pengunjung. Dari destinasi wisata tampak penyebaran pengunjung tidak rata. Pengunjung hanya memenuhi beberapa destinasi wisata Kabupaten Magetan saja. Pengunjung memenuhi kawasan wisata mayoritas pada akhir tahun sekitar bulan Desember.

Untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata Kabupaten Magetan perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan pengelolaan objek wisata daerah agar lebih optimal fungsinya, lebih berdaya guna dan berhasil guna. Daerah perlu meningkatkan pelayanan umum. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan destinasi wisata itu dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata, sekaligus dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah yang berupa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk memberikan peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kepariwisataan khususnya penyediaan sarana prasarana dan fasilitasi destinasi wisata yang lebih baik. Pembiayaan daerah, *budget policy* (kebijakan pembiayaan) pemerintah daerah dapat diarahkan untuk melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ini terbuka bagi Pemerintah Daerah baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembiayaan daerah sebagai pembentukan Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Kabupaten Magetan diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang tepat untuk mengakomodasi semua kebutuhan dasar Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka mengatasi permasalahan kepariwisataan daerah dan sekaligus meningkatkan fungsi pengelolaan destinasi wisata untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang kepariwisataan, peningkatan PAD, dan juga ikut mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Dengan pola pengelolaan BUMD, akan dipandang lebih leluasa untuk berkembang secara professional, maju dengan menerapkan tata pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance = GCG). Pengelolaan BUMD yang professional, maju dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance dalam rangka memenuhi kepentingan shareholders (pemilik BUMD) dan stakeholders (masyarakat luas).

Terhadap kebutuhan masyarakat, Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Masyarakat secara umum dan para pengusaha pariwisata secara khusus membutuhkan pelayanan bidang pariwisata atau secara spesifik pelayanan destinasi wisata daerah. Masyarakat pengunjung berhadapan pengelolaan Destinasi Wisata dapat lebih menarik, rapi dan indah, nyaman dan aman sehingga dapat memenuhi kebutuhan pariwisata para pengunjung maupun kebutuhan wisata belanja bagi masyarakat secara lebih luas. Masyarakat konsumen atau pengunjung membutuhkan keberadaan objek-objek pariwisata yang maju dan profesional dalam memberikan pelayanan, sehingga kebutuhan barang dan jasa sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik.

Masyarakat Kabupaten Magetan yang memperoleh manfaat dengan dikembangkannya objek-objek Pariwisata oleh BUMD sehingga menjadi kegiatan pariwisata dengan pelayanan lebih modern. Manfaat dimaksud dapat berupa manfaat tangible (berwujud) yaitu tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas pusat belanja dengan segala fasilitas pendukungnya yang berfungsi mewadahi kegiatan ekonomi, pariwisata/ rekreasi, seni budaya dan hiburan serta menjadi pusat perdagangan/ pembelanjaan daerah. Manfaat lain yaitu bersifat intangible (tidak berwujud) berupa semakin indah dan modern wajah Kabupaten Magetan tanpa harus mengesampingkan fungsi utama sebagai pusat perdagangan maupun tempat-tempat indah dan modern yang sudah ada, namun justru menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi, terpadu yang berkesinambungan. Reni (2017) menekankan jika BUMD sekaligus lembaga memiliki peran sosial dengan fungsi dan peran yang tidak ringan.

Berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan pembentukan atau pembentukan BUMD Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Kabupaten Magetan ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Magetan khususnya dan bermanfaat pula bagi masyarakat seluruh Kabupaten Magetan, baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan. Keuntungan yang diterima dari aspek ekonomi yaitu peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan komponen PAD lainnya (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan, dan lain sebagainya), serta hasil sewa lahan dan bangunan bagi para pelaku usaha pengguna jasa pariwisata.

Dalam aspek pasar dan pemasaran pasar pengguna jasa pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Magetan berasal dari pasar dalam negeri atau wisatawan domestik. Jumlah pengunjung daerah tujuan wisata atau wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan. Pemasaran terus ditingkatkan melalui website atau sosial media untuk mudah menarik perhatian pengunjung. Dari aspek yuridis, Pemerintah Kabupaten Magetan dapat membentuk BUMD berupa Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Kabupaten Magetan dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan Pariwisata Daerah dengan model pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Asset Daerah dipandang kurang tepat karena memiliki prosedur dan mekanisme yang rumit sehingga menjadi beban tersendiri bagi perangkat daerah yang akan menanganinya. Dengan keberadaan BUMD pariwisata nantinya mampu meningkatkan pemberdayaan asset/ kekayaan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan daerah dan bidang usaha maka dapat dikatakan jika pembentukan BUMD Pariwisata layak. Analisis kebutuhan daerah terpecah menjadi dua yaitu pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Magetan perlu meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dengan fokus pada dua hal tersebut. Pembentukan BUMD Pariwisata dapat memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Magetan khususnya dan bermanfaat pula bagi masyarakat seluruh Kabupaten Magetan, baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan. Kendati demikian harus diperhatikan beberapa aspek yang berhubungan dengan

pembentukan BUMD tersebut. pembentukan BUMD pariwisata dari aspek ekonomi layak dijalankan karena bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas. Dari aspek pasar dan pemasaran dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dari aspek yuridis Pemerintah Kabupaten Magetan perlu mengkaji ulang dengan mengacu PP No.54 tahun 2017. Dari aspek pemberdayaan aset/ kekayaan daerah mampu meningkatkan pemberdayaan asst/ kekayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumiasih, K. (2018). Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565-585.
- Middleton Victor, T.C...&Jackie,C.(2001). *Marketing in travel and tourism*
- Munthe, K. (2019). Studi Kelayakan Pembentukan Bumd Aneka Usaha Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 1-13.
- Setiawan, D., Jostenz, T. G., & Novalino, R. D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Ekonomi Pertahanan*, 4(3).
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.*
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan <https://magetankab.bps.go.id/>
- Anggraini, R. (2017). Analisis Kontribusi Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2011-2015 (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).